



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : YUDIKATIF  
**LEMBAGA** : MAHKAMAH AGUNG  
**UNIT KERJA** : PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : REZA KRESNA ADIPRAYA
2. Jabatan : HAKIM
3. NHK : 757748

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	<b>Rp.</b>	<b>126.100.000</b>
1. Tanah dan Bangunan Seluas 8 m2/25 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 126.100.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	<b>Rp.</b>	<b>28.000.000</b>
1. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 28.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>5.170.000</b>
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>Rp.</b>	<b>76.937.000</b>
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>799.835</b>
<b>Sub Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>237.006.835</b>
<b>III. HUTANG</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	<b>Rp.</b>	<b>237.006.835</b>

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



Reza Adipraya <rezaadipraya@gmail.com>

## Bukti Penerimaan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi

2 messages

Direktorat Jenderal Pajak <no-reply@pajak.go.id>  
To: rezaadipraya@gmail.com

Tue, Feb 3, 2026 at 12:00 PM



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

**Direktorat Jenderal Pajak**

Layanan Informasi & Pengaduan: (021) 1500200 [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)  
[pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)

### BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)

Nomor BPE	: <b>BPE-22282/CT/KPP.3007/2026</b>
Tanggal	: 03 Februari 2026
NPWP	: 3174042902880015
Nama Wajib Pajak	: REZA KRESNA ADIPRAYA
Jenis SPT	: SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi
Tahun Pajak	: 2025
Masa Pajak	: Januari - Desember 2025
Status SPT	: Normal
Saluran	: Portal Wajib Pajak
Tanggal Terima SPT	: 03 Februari 2026

Dokumen ini diterbitkan secara elektronik oleh Coretax DJP dan sah sebagai Bukti Penerimaan Elektronik. Tidak memerlukan tanda tangan basah.

*Terima kasih telah menggunakan layanan digital DJP. SPT Anda telah tercatat dan diterima dengan baik.*

Mohon simpan email ini sebagai arsip pribadi Anda.

Direktorat Jenderal Pajak <no-reply@pajak.go.id>  
To: rezaadipraya@gmail.com

Tue, Feb 3, 2026 at 12:32 PM

[Quoted text hidden]